

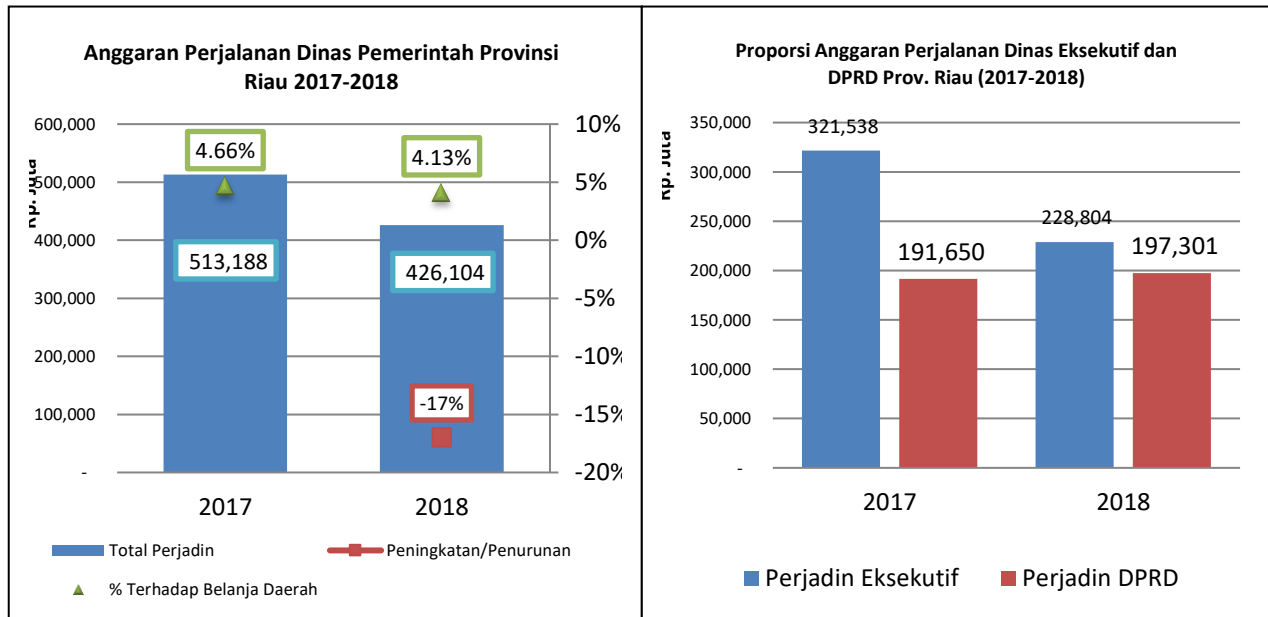
JenisBerkas	: PersRilis	No. Arsip	: PR.Januari 15/02
Judul	: Catatan APBD Riau 2018 (2)	Tanggal	: 15 Januari 2018
Sub Judul	: Gagal Menghemat APBD : DPRD Riau “Berbagi” APBD Dengan Perjalanan Dinas	Tahun	: 2018
		Penulis	: *FITRA RIAU*

Gagal Menghemat APBD Berbagi APBD Dengan Perjalanan Dinas

Komitmen pemerintah Provinsi Riau untuk menghemat APBD dari belanja daerah yang dikategorikan pemborosan hingga saat ini **gagal terwujud**. Kebijakan anggaran yang direncanakan dalam APBD 2018 masih diwarnai dengan pemborosan anggaran. Salah satunya adalah anggaran perjalanan Dinas yang seolah-olah seperti bagi-bagi APBD.

Fitra Riau mencatat, bahwa belanja daerah Pemerintah Provinsi Riau tahun 2018 direncanakan sebesar **Rp. 10.3 T**. Lebih rendah **Rp. 1 Triliun** dari tahun sebelumnya (2017) yaitu sebesar Rp. 11,3 Triliun. Dari total belanja daerah tersebut, pemerintah menganggarkan belanja Perjalanan Dinas (Perjadin) tahun 2018 sebesar **Rp. 426 Milyar**. Meskipun secara nominal anggaran Perjadin tahun 2018 menurun, namun secara proporsi dari total belanja daerah tahun 2018 hampir sama dengan tahun 2017.

“Tahun 2017, ketika APBD sebesar Rp. 11,3 Triliun Pemprov menganggarkan Rp. 513 Milyar (4,6% dari total APBD), sedangkan tahun 2018 ketika APBD sebesar Rp. 10,3 Triliun, belanja Perjadin 4,13% dari total APBD. Artinya, secara proporsi tidak berubah antara tahun 2018 maupun 2017”.



Lebih lanjut Fitra Riau mencatat, meskipun tahun 2018 anggaran perjalanan dinas provinsi Riau menurun, namun anggaran perjalanan dinas DPRD Riau justru meningkat 3% dibandingkan tahun 2017 lalu. Tahun ini di Sekretariat DPRD anggaran perjalanan dinas sebesar **Rp. 197,3 Milyar**, sementara tahun 2017 sebesar **Rp. 191,6 Milyar**. Pengurangan biaya perjalanan terjadi untuk SKPD selain DPRD 2017 sebesar Rp. 321 Milyar menjadi Rp. 228 milyar tahun ini.

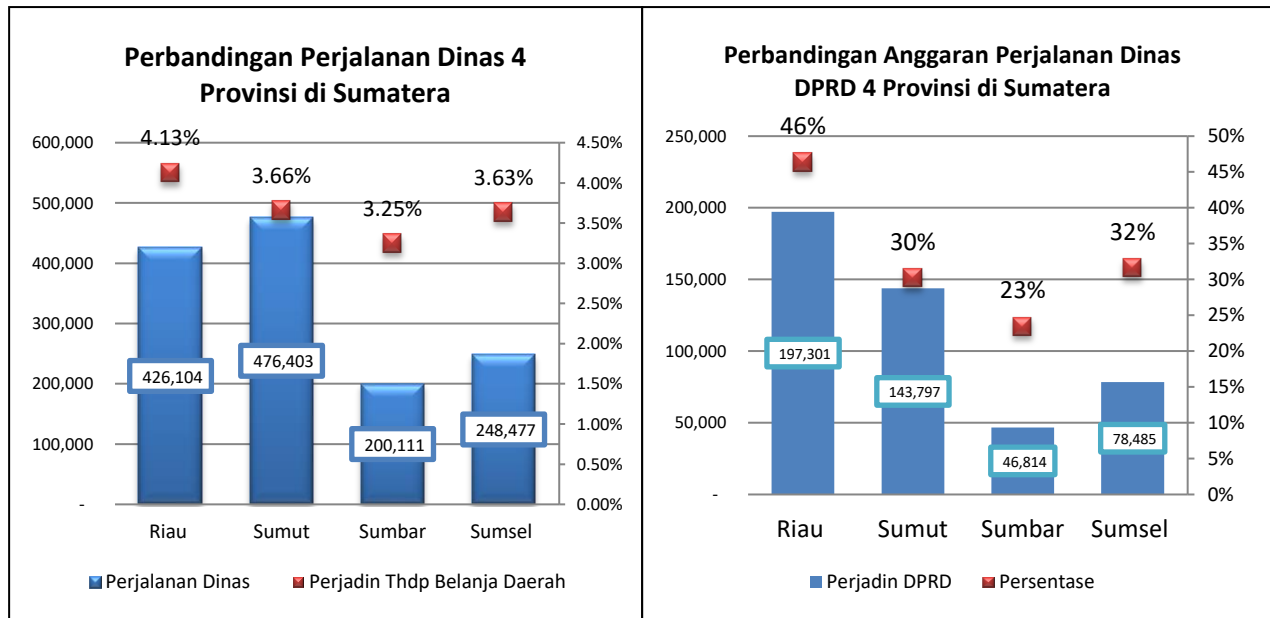
“Artinya pemerintah Provinsi hanya berani mengurangi belanja perjalanan dinas untuk pemerintah, sementara tidak berani mengurangi perjalanan dinas di DPRD, begitu juga sebaliknya DPRD tegas dengan pemerintah sementara anggarannya aman tidak diganggu gugat”.

Proporsi Anggaran Perjadin Riau Terbesar

Untuk melihat apakah anggaran Perjalanan Dinas Provinsi Riau adalah bentuk pemborosan APBD. Fitra Riau membandingkan dengan Provinsi-Provinsi lainnya di Sumatera yang memiliki jumlah APBD yang lebih besar atau hampir sama dengan provinsi Riau. Daerah tersebut yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan.

Secara proporsi dari jumlah total belanja daerah, perjalanan Provinsi Riau terbesar dibandingkan dengan tiga daerah lainnya itu. Sumut misalnya, APBD sebesar **Rp. 13,01** Triliun menganggarkan biaya perjalanan dinas **hanya 3,6%** dari total APBDnya (Rp. 476,4 Milyar). Provinsi Sumbar dengan APBD sebesar **Rp. 6,1 Triliun**, perjalanan dinas 3,2% (Rp. 200 milyar), sementara Sumsel dengan APBD sebesar 3,6% dari total APBDnya (Rp. 248,4 Milyar). Sementara Provinsi Riau menganggarkan perjalanan dinas mencapai 4,13% dari total belanja daerahnya.

“Kondisi tersebut secara jelas menggambarkan bahwa Provinsi Riau boros dalam menganggarkan perjalanan dinas. Bahkan jika dibandingkan, daerah –daerah tersebut memiliki jumlah kabupaten/kotanya jauh lebih banyak dari pada Provinsi Riau. Provinsi Sumut 33 kabupaten, Sumbar 19 Kabupaten/kota, Sumsel 17 Kabupaten/kota, sementara Riau hanya 12 Kabupaten/kota. . ”.



Perjalanan Dinas “Berbagi” APBD di DPRD Riau

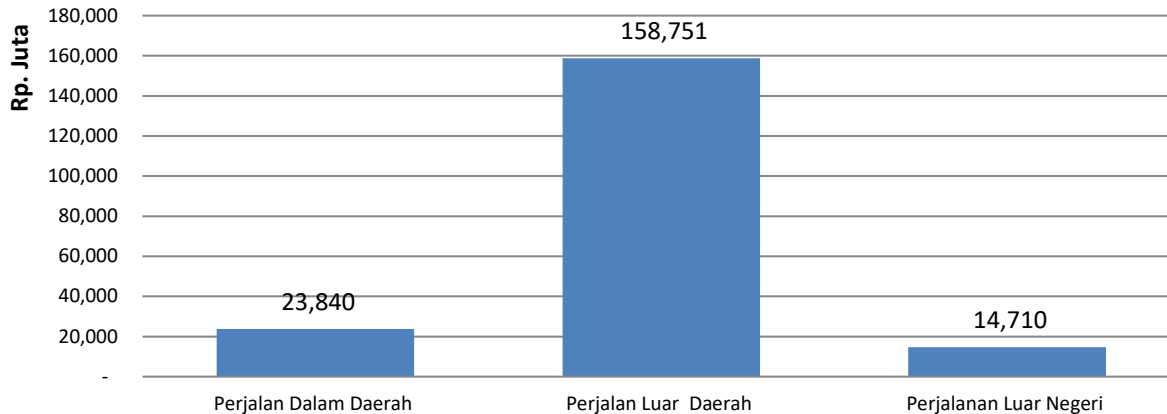
54% (Rp. 197 milyar) dari total anggaran 2018 di Sekretariat DPRD Riau sebesar **Rp. 363 Milyar**, digunakan untuk perjalanan dinas, sedangkan 21% (Rp. 76 Milyar) digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan. Sisanya digunakan untuk kegiatan rapat dan alat tulis kantor termasuk membiayai tenaga ahli dan pengamanan kantor DPRD.

Anggaran perjalanan dinas DPRD Riau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 3 daerah lainnya bahkan mencapai 3 kali lipatnya, sementara jumlah orang (anggota) DPRDnya jauh lebih sedikit. Misalnya Provinsi Sumut, jumlah anggota DPRDnya sebanyak 100 anggota dengan 33 Kabupaten/Kota sedangkan Provinsi Sumsel jumlah anggota DPRDnya 75 dengan 17 wilayah kabupaten.

Selain jumlahnya yang fantastis, lebih besar dari daerah-daerah lainnya, Fitra Riau juga menilai bahwa anggaran perjalanan dinas yang dialokasikan untuk DPRD Riau, seolah-olah ajang berbagi APBD yang

dimasukkan dalam biaya perjalanan dinas. Alokasi anggaran untuk belanja perjalanan dinas di DPRD Riau **80% digunakan untuk kegiatan perjalanan dinas Luar Daerah**, 7% anggaran digunakan untuk perjalanan dinas luar negeri. Sementara 12% alokasi anggaran yang digunakan untuk perjalanan dalam daerah.

Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Riau 2018



Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau nomor 29 tahun 2017 tentang Pedoman Perjalanan dinas, Perjalanan luar daerah adalah perjalanan yang dilakukan diluar Provinsi Riau. yaitu perjalanan dinas ke provinsi lain atau ke pemerintah pusat sesuai dengan tugas-tugasnya. Untuk melakukan perjalanan ini DPRD Provinsi harus mengalokasikan anggaran **Rp. 158 milyar**. Bahkan perjalanan dinas ke luar negeri juga masih akan dilakukan.

“Sementara Perjalanan didalam daerah porsinya sidikit, dan dapat dikatakan Anggota DPRD akan lebih sering ke luar daerah dari pada mengunjungi masyarakat. Sangat wajar jika disebut berbagi-bagi APBD melalui perjalanan dinas”.

Tidak hanya itu, tahun 2018, DPRD juga mendapatkan jatah anggaran yang berkali lipat dari tahun sebelumnya. Seperti, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi, perumahan dan operasional. Bahkan terdapat beberapa item anggaran tunjangan yang meningkat dua kali lipat lebih besar dari tahun sebelumnya. Anggaran ini berntuk *lumsump*, kerja tidak kerja tunjangan tetap diberikan, tanpa melihat kinerja. Misalnya tunjangan komunikasi misalnya, meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Bentuk Tunjangan	2017	2017	Jmlh	Per Anggota
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7,020,000,000	16,380,000,000	65	252,000,000
Belanja Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	0	4,095,000,000	65	63,000,000
Belanja Tunjangan Transportasi Anggota DPRD	0	15,800,328,000	65	243,081,969
Belanja Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	18,081,600,000	18,081,600,000	65	278,178,462
Dana Operasional Pimpinan DPRD	561,600,000	561,600,000	5	112,320,000

Tidak Sesuai Dengan Hasil Kinerja

Sementara, fasilitas yang diberikan belum dapat dikatakan seirama dengan hasil kinerja yang dilakukan. Seperti tugas legislasi yang menjadi kewenangan DPRD, tahun 2016- 2017 DPRD hanya berhasil menyelesaikan 17 Peraturan Daerah (Perda), sebagian merupakan Perda Rutin tahunan seperti APBD Murni, Perubahan, dan Pertanggungjawaban. Tahun 2016, dari 32 target Prolegda yang direncanakan hanya 6 Perda yang dapat diselesaikan. Sedangkan 2017 dari 25 target Polegda hanya 11 Perda yang dapat diselesaikan.

Begitu juga mengenai fungsi *budgeting* atau penganggaran yang berkaitan langsung dengan aspirasi masyarakat. Minggu lalu Fitra Riau telah menganalisis program pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Provinsi tahun 2018. Bagaimana peran DPRD dalam proses perencanaan tersebut?. hal itu menunjukkan bukti bahwa DPRD tidak maksimal dalam pengawalan proses perencanaan pembangunan dan anggaran, yang tidak sesuai (*inskonsisten*) dengan rencana pembangunan.

Oleh karena itu, maka pemerintah (Gubernur) harus mengevaluasi kembali anggaran perjalanan Dinas baik di pemerintah (eksekutif) maupun di Sekretariat DPRD. Tentu belum terlambat, karena masih tercatat di dokumen APBD. Gubernur harus menyeleksi secara ketat dengan membentuk tim khusus untuk menilai apakah perjalanan dinas yang dilakukan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

Menjadi catatan penting bagi Mendagri untuk mengvaluasi secara lebih teliti dan cermat. Pemerintah daerah harus diberikan standar, berapa persen penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas. Agar pemerintah daerah tidak leluasi semanya menganggarkan biaya perjalanan dinas. Selain pemborosan, perjalanan dinas adalah ruang yang mudah untuk dimanipulasi. Berbagai temuan korupsi perjalanan dinas mestinya menjadi pertimbangan untuk mengoreksi.

Fitra Riau, 15 Januari 2018